

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006)
- Hadjon, Philipus. *pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu. 1987)
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia. 2007)
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010)
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press. 2009)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000)
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: Pustaka Setia. 2015)
- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007)
- Soejito, Irawan. *Membuat Undang-Undang*. (Yogyakarta: Liberty Publishing. 1998)
- Soekirno. *Kota Semarang*. (Semarang: Kota Djawatan Penerangan Besar Semarang. 1956)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1984)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013)
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982)

- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Masalah-Masalah yang Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Setelah Amanemen UUD*. (Yogyakarta: FH UII Press. 2003)
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008)
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983)
- Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002)

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
- Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
- Surat Keputusan BAPPEDA Kota Salatiga Nomor 050/958/2009

Surat Keputusan BP3 Jawa Tengah Nomor 1585a/101.SP/BP3/P-XI/2009

Surat Pemberitahuan Sekda Salatiga Nomor 430/941/2010

C. JURNAL

Hendrik Hattu. "Tahapan Undang-Undang Responsif". Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 23. No. 2. Juni 2011.

Putra Arifin Hafidz. "Politik Hukum perlindungan Cagar Budaya di Indonesia". Jurnal Dialogia Iuridica Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Vol. 10. No. 1. November 2018.

Saiful Bahri. "Upaya Pelestarian Cagar Budaya Hollandsch Inlandsche School (HIS) Pertama di Pontianak". Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 3. No. 1. Juni 2019

Sukardi. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya". Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 27. Nomor 2. Mei-Agustus 2012

D. ARTIKEL ILMIAH

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Ceramah : "Penafsiran Undang-Undang dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan". Makalah disampaikan pada Forum Dialog Interaktif Penafisan Undang-Undang". (Jakarta, 30 April 2009).

Hamid Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara". (Disertasi Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia. 1990).

Philipus M. Hadjon Ceramah : "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Makalah disampaikan pada Simposium "Politik, Hak Asasi dan Pembangunan" Dies Natalis XL Lustrum VII Universitas Airlangga. (Surabaya, 3 November 1994).

Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. "Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011". (Semarang: Universitas Diponegoro. 2011).

E. WEBSITE

Parwito, “Sejarah Tugu Muda dan Pertempuran 5 Hari di Semarang”, Harian Merdeka, Dipublish pada Senin, 14 Oktober 2013, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-tugu-muda-dan-pertempuran-5-hari-di-semarang.html>,.

Wibisono, “Vandalisme Sasar Tugu Muda Semarang Picu Kemarahan Warga”, Harian Solopos Jawa Tengah, Publikasi Senin, 8 Januari 2018, diakses melalui <https://www.solopos.com/vandalisme-sasar-tugu-muda-semarang-picu-kemarahan-warga-882888>.